

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112 Telp. 0536 - 3224547

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes

NIP

: 19630527 199102 1 001

Jabatan

: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: H. SUGIANTO SABRAN

Jabatan

: GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya,

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

DINAS P3A-PF

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes NIP. 19630527 199102 1 001

Januari 2019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112 Telp. 0536 - 3224547

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

Unit

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan:
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- I. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	(Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng) dikali 100	DINAS P3APPKB, BAPPEDAlitbang, BKAD

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber dat
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan di lembaga legislative (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD)) dikali 100	DINAS P3APPK BPS, Sekretaria DPRD
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	(Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DINAS P3APPK BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DINAS P3APPKI (P2TP2A)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS P3APPKE (P2TP2A)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	(Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DINAS P3APPKE
		Rasio anak korban kekerasan	(Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DINAS P3APPKE (P2TP2A)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS P3APPKE (P2TP2A)
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DINAS P3APPKE
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektorat, Biro Organisasi

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet Need KB) dibagi Total Jumlah PUS)	BPS, BKKBN

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2019 Pihak Pertama

KEPALA DINAS,

DINAS P3A-PPKB

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes NIP. 19630527 199102/1 001